

Peranan Jepang dalam Sektor Luar Negeri Indonesia

Endang Sih Prapti^{)}*

Kasus mobil nasional (mobnas) mengguncang hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara produsen-eksportir mobil yang selama ini menjadi pemasok ke Indonesia, khususnya Jepang. Jepang menuduh Indonesia melakukan praktek diskriminasi yang bertentangan dengan ketentuan perdagangan bebas WTO. (*World Trade Organization*) Tulisan ini tidak bermaksud menganalisa benar tidaknya tuduhan tersebut, karena tuduhan itu sendiri masih dalam proses pembuktian, yang diramalkan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu singkat. Tulisan ini ditujukan untuk melihat apakah Indonesia perlu menanggapi tuduhan tersebut secara serius.

"Retaliasi Jepang" merupakan solusi natural Jepang terhadap kasus mobnas, yang perlu diantisipasi Indonesia. Keseriusan permasalahan yang akan dihadapi Indonesia merupakan fungsi dari ukuran dampak "retaliasi Jepang" tersebut terhadap perekonomian Indonesia, melalui dampaknya terhadap sektor luar negeri Indonesia. Tentu saja, Indonesia juga dapat membalas melakukan "retaliasi balik" kepada Jepang. Jika hal itu terjadi, maka yang jelas kedua negara akan "terluka", dan besarnya "luka" yang akan ditanggung Indonesia merupakan fungsi dari kekuatan

relatif arti penting tiap negara kepada perekonomian negara yang lain. Namun demikian, tulisan ini lebih menitikberatkan pada pengkajian peranan penting Jepang terhadap sektor luar negeri Indonesia, yang pada gilirannya akan berpengaruh kepada perekonomian Indonesia. Sektor luar negeri yang akan diamati meliputi hutang luar negeri dan neraca perdagangan. Hipotesa yang digunakan sebagai pemandu pengkajian adalah bahwa Jepang mempunyai peranan *crucial* terhadap perekonomian Indonesia.

KASUS MOBIL JEPANG DAN MOBIL NASIONAL

Pemasaran mobil Jepang di Indonesia tumbuh subur sejak awal era Orde Baru pertengahan tahun 1960-an. Mulanya perdagangan mobil dilakukan dengan cara ekspor. Dengan adanya kasus Malari tahun 1974 Jepang mengubahnya menjadi internalisasi dalam bentuk relokasi produksi dengan bekerjasama dengan Toyota Astra Motor, perusahaan patungan Indonesia-Jepang. Namun demikian, meskipun Jepang telah melakukan relokasi, pabrik-pabrik tersebut telah bersifat perakitan, karena komponen-komponen utama mobil, seperti mesin mobil, masih tetap harus diimpor

^{*)}Penulis adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada dan dosen tidak tetap Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

dari Jepang. Sejak tahun 1974 sampai pertengahan 1996, saat munculnya mobil nasional, pasar mobil di Indonesia telah menjadi sumber rejeki oligopoli produsen-eksportir mobil Jepang, bersama-sama dengan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat dan Eropa.

Kebijakan paket deregulasi mobil yang melahirkan mobil nasional merupakan kebijakan yang tidak terduga dalam aktifitas pasar yang sebenarnya telah menunjukkan perkembangan yang sehat (Connexion, October/November 1996). Era mobil nasional, yang diawali Juli 1996, mengakhiri era "oligopoli" produsen-eksportir mobil asing di Indonesia. Argumentasi "mahal" nya harga mobil di Indonesia melandasi lahirnya kebijakan memproduksi mobil nasional tersebut. "Mahal" nya harga mobil di Indonesia, menurut argumentasi tersebut, adalah karena mobil masih dikategorikan barang impor, sehingga terkena segala macam bentuk pajak yang terkait dengan status "barang impor" tersebut. Dan sebagai akibat "mahal" nya harga mobil, maka mobil baru dapat dinikmati oleh golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas (Sulaiman, 1996). Dengan diproduksi mobil di dalam negeri, yang oleh karenanya akan dibebaskan dari segala bentuk pajak tersebut, maka mobil akan menjadi lebih murah dan lebih terjangkau oleh ukuran kantong konsumen Indonesia.

Di lain pihak, bagi negara-negara produsen-eksportir mobil ke Indonesia, khususnya Jepang, yang sudah puluhan tahun menikmati "rejeki oligopoli" dari pasar mobilnya di Indonesia, melihat kebijakan mobnas sebagai malapetaka, karena mobnas berarti ancaman kehilangan rejeki rutinnya tersebut. Terlebih lagi karena pada

pengimplementasian kebijakan tersebut bahwa mobnas tidak seperti mobnas per definisinya, *pertama* karena masih diproduksi di luar negeri (Korea Selatan), dan *kedua* karena dalam kepemilikan produksi mobnas terlalu ditonjolkan peranan swastanya, kurang menonjolkan keikutsertaan BUMN, dalam hal ini Departemen Industri dan Perdagangan, dalam kepemilikannya (seperti Proton Saga di Malaysia). Hal ini cukup untuk memuaskan "isu diskriminasi", yang dapat berdampak tindakan retaliasi.

RETALIASI, PERDAGANGAN DAN UTANG LUAR NEGERI

Perdagangan bebas dilandaskan pada dua azas, yaitu (1) azas *resiprositas*, yang artinya pemberian konsensi dagang oleh negara A kepada negara B untuk masuk ke dalam pasar negara A harus diimbangi dengan pemberian konsensi dagang oleh negara B kepada negara A untuk ke dalam pasar negara B; (2) azas *non-diskriminasi* atas MFN (*Most Favored Nations*), yang artinya perlakuan yang diterapkan oleh negara A kepada negara B, harus diterapkan dengan sama oleh negara A kepada negara-negara yang lain (Brown, 1979). Jika ternyata WTO beranggapan bahwa tuduhan Jepang kepada Indonesia beralasan, maka Indonesia akan dianggap telah melanggar kedua prinsip tersebut. Melanggar prinsip kedua, karena memberikan perlakuan istimewa kepada Korea Selatan, melanggar prinsip pertama karena Jepang akan menganggap Indonesia tidak memberikan konsensi yang seimbang. Kedua pelanggaran tersebut dapat menjadi alasan yang cukup kuat bagi Jepang untuk melakukan tindakan balasan atau retaliasi.

Hubungan Jepang dan Indonesia diawali dengan penjajahan Jepang atas Indonesia selama 3 tahun, 1942-1945, yang diikuti dengan era pembayaran perampasan perang Jepang kepada Indonesia dalam era Orde Lama. Hubungan ekonomi kedua negara tumbuh subur dalam era Orde Baru, melalui hubungan sektor luar negeri kedua negara. Tulisan ini akan menelusuri peranan Jepang dalam sektor luar negeri melalui hutang luar negeri, bantuan luar negeri, dan perdagangan luar negeri.

Jepang telah menjadi tumpuan sumber dana pembangunan Indonesia, terutama sejak Orde Baru. Hubungan hutang luar negeri antara Indonesia (debitur) dan Jepang (kreditur) tersebut dibedakan antara hutang dan bantuan pembangunan. Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa di antara 34 negara kreditur, besarnya hutang yang telah diberikan oleh Jepang kepada Indonesia sangat menyolok, yaitu sebesar US\$20,935,545,000 per 31 Desember 1994, atau sebesar 69%. Angka tersebut menunjukkan bahwa besarnya pinjaman yang diberikan Jepang (1 negara) melebihi total pinjaman dari ke 33 negara kreditur yang lain. Atau dengan kata lain, tanpa Jepang, Indonesia kehilangan 69% dari sumber dananya.

Demikian juga yang terjadi dalam bantuan pembangunan. Setiap kali Indonesia membentuk kelompok negara-negara donor untuk pembiayaan pembangunannya, baik dalam IGGI (*Inter Governmental Group on Indonesia*) maupun CGI (*Consultation Group for Indonesia*), Jepang selalu tampil sebagai donor utama.

Dalam Tabel 2, dapat dilihat bahwa rata-rata tiap tahunnya (1987-1992) bantuan

pembangunan dari Jepang meliputi rata-rata sebesar US\$1,393,966,700, atau dengan pangsa rata-rata sebesar 62% dari total bantuan CGI, dan 61% dari total bantuan. Melihat angka-angka tersebut, seperti halnya pada hutang, besarnya bantuan pembangunan dari Jepang (1 negara) juga melebihi jumlah total bantuan pembangunan yang diberikan oleh negara-negara lainnya. Hal ini berarti bahwa tanpa Jepang Indonesia akan kehilangan 60% dari seluruh bantuan pembangunan yang diperlukan.

NERACA PERDAGANGAN

Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Jepang merupakan hubungan perdagangan yang solid dengan nilai perdagangan yang cukup besar. Dalam Tabel 3 disajikan neraca perdagangan bilateral Indonesia-Jepang tahun 1990-1994. Disamping itu juga disajikan perdagangan bilateral Indonesia-AS, dan Indonesia-Eropa sebagai pembanding. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa baik ekspor maupun impor bilateral Indonesia-Jepang melebihi ekspor dan impor bilateral Indonesia dengan AS dan dengan Eropa. Ekspor Indonesia ke Jepang rata-rata sebesar 34% dari total ekspor, sedangkan impor Indonesia dari Jepang rata-rata meliputi 23% dari total impor Indonesia.

Di samping itu, dibandingkan dengan perdagangan bilateral Indonesia dengan AS dan Eropa, neraca perdagangan bilateral Indonesia-Jepang menunjukkan surplus terbesar, yaitu dengan aliran netto devisa masuk rata-rata sebesar US\$4,585,800,000 per tahunnya. Dalam perdagangan bilateral Indonesia-AS, aliran netto devisa masuk

Tabel 1
Posisi Pinjaman Bilateral Indonesia per 31 Desember 1994
(Dalam Ribuan US\$)

Negara kreditur	Realisasi	Tidak dicairkan	Komitmen
Australia	526,116	15,667	541,783
Austria	6,343	—	6,343
Belgium	95,484	38,805	134,289
Brunei	100,000	—	100,000
Bulgaria	570	—	570
Canada	314,512	228,104	542,616
Cina	32,022	12,034	44,058
Czechoslovakia	19,005	—	19,005
Denmark	57,806	4,859	62,665
Egypt, Arap Republic of	796	—	796
France	973,407	224,996	1,198,403
German Dem. Rep.	15,630	—	15,630
Germany, Fed. Rep. of	3,041,186	973,290	4,014,476
Hungary	4,741	—	4,741
India	1,571	—	1,571
Italy	174,801	17,608	192,409
Japan	20,935,545	5,619,950	26,555,495
Korea, Republic of	19,111	73,521	92,632
Kuwait	52,049	12,145	64,194
Netherlands	1,042,621	12,539	1,055,160
New Zealand	599	—	599
Norway	0	27,354	27,354
Other	20,000	—	20,000
Pakistan	1,935	—	1,935
Poland	26,695	—	26,695
Romania	3,825	—	3,825
Saudi Arabia	62,724	23,222	85,946
Spain	182,194	105,656	287,850
Switzerland	31,890	—	31,890
United Arab Emirates	896	—	896
United Kingdom	50,770	14,960	65,730
United States	2,483,826	173,097	2,656,923
USSR	278,539	—	278,539
Yugoslavia	31,997	—	31,997
Total pinjaman bilateral	30,589,206	7,577,807	38,167,013

sumber: IBRD Debtor Reporting System, berdasarkan data yang disediakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dikutip dan *Indonesia, Dimensions of Growth*, Laporan Bank Dunia, 7 Mei 1996.

Tabel 2
Realisasi Bantuan Luar Negeri, 1987 - 1992
(Dalam Juta US\$)

Negara	1987	1988	1989	1990	1991	1992
<i>Negara-negara CGI</i>						
Australia	48.2	71.7	83.1	77.4	72.9	77.0
Austria	0.6	10.5	15.7	34.3	49.3	121.6
Belgium	5.8	13.3	10.7	6.5	42.4	8.2
Canada	45.4	43.3	38.4	51.9	45.4	40.1
France	43.5	67.6	115.3	136.0	141.6	185.3
Germany	140.4	190.2	138.8	211.4	253.8	261.4
Italy	19.8	2.8	21.2	11.3	15.8	13.8
Japan	941.1	1,264.7	1,407.1	1,131.9	1,382.5	1,696.5
Netherlands	165.0	186.5	191.0	228.4	180.5	56.1
New Zealand	2.1	2.3	2.2	3.1	2.4	2.6
Spain	-	-	0.1	23.2	21.5	9.5
Switzerland	7.4	28.4	21.4	19.4	13.8	29.7
United Kingdom	14.5	21.7	18.2	26.4	42.9	36.6
United States	96.0	86.0	97.0	101.0	83.0	84.0
Subtotal	1,529.8	1,989.0	2,160.2	2,062.2	2,347.8	2,622.4
<i>Negara-negara non CGI</i>						
Denmark	0.8	1.1	11.5	5.7	3.0	5.9
Finland	1.8	3.3	5.8	2.7	3.1	1.8
Ireland	0.6	-	-	-	-	0.0
Norway	0.8	2.2	1.2	0.3	0.8	12.6
Sweden	-	-	-	0.1	0.2	0.4
Negara-negara Arab	24.4	27.9	20.5	39.2	23.1	22.5
Subtotal	28.4	34.5	39.0	48.0	30.2	43.2
Total	1,558.2	2,023.5	2,199.2	2,110.2	2,378.0	2,665.6
(*)	62	64	65	55	59	65
(**)	61	63	64	54	58	64

sumber : IBRD Debtor Reporting System, berdasarkan data yang disediakan oleh Bank Indoneisa sebagaimana yang dikutip dari *Indonesia. Dimension of Growth*, Laporan Bank Dunia, 7 Mei 1996.

(*) Pangsa Jepang dalam Total Bantuan CGI

(**) Pangsa Jepang dalam Total Bantuan

yang dihasilkan hanya sebesar seperempatnya, yaitu sebesar US\$ 1,152,800,000 per tahunnya, sedangkan dengan Eropa, Indonesia masih dalam posisi defisit.

Peranan penting perdagangan bilateral dengan Jepang ditunjukkan juga oleh kenyataan bahwa Jepang menjadi negara tujuan ekspor utama bagi sebagian besar komoditas ekspor andalan Indonesia, antara lain komoditas ikan mentah menjadi 45% dari total ekspor ikan mentah atau sebesar US\$67 juta rata-rata per tahun (1983-1989), kopi sebesar 16% atau US\$80 juta rata-rata per tahunnya (1982-1991), dan karet sebesar 5% atau 48 ribu metric rata-rata per tahunnya

(1989-1992).

Di samping itu perlu dikemukakan juga bahwa pengkajian terhadap perdagangan bilateral Indonesia-Jepang menunjukkan bahwa komoditas ekspor Indonesia memiliki elastisitas yang kurang dari satu, yang berarti komoditas ekspor Indonesia didominasi oleh komoditas yang diperlukan oleh Jepang. Demikian pula, elastisitas permintaan impor Indonesia dari Jepang yang juga kurang dari satu, menunjukkan bahwa komoditas impor dari Jepang juga diperlukan oleh Indonesia (Djatisasongko, 1994).

Dari uraian tentang perdagangan bi-

Tabel 3
Neraca Perdagangan Bilateral Indonesia, 1990-1994
(Dalam Juta US\$)

Tahun	REKAN DAGANG										
	Jepang			AS			Eropa			Total	
	Ekspor	Impor	Neraca	Ekspor	Impor	Neraca	Ekspor	Impor	Neraca	Ekspor	Impor
1990	10,923 (43)	5,300 (24)	3,3623	3,365 (13)	2,520 (11)	845	3,028 (12)	4,061 (18)	-1,033	25,675	22,431
1991	10,767 (37)	6,327 (24)	4,440	3,509 (12)	3,397 (13)	112	3,742 (13)	4,704 (18)	-962	29,142	25,869
1992	10,761 (31)	6,014 (22)	4,747	4,419 (12)	3,822 (14)	597	4,843 (14)	5,401 (20)	-558	33,967	27,279
1993	11,172 (30)	6,248 (22)	4,924	5,230 (14)	3,255 (12)	1,975	5,295 (14)	5,652 (20)	-357	36,823	28,328
1994	10,929 (27)	7,734 (24)	3,195	5,829 (15)	3,594 (11)	2,235	5,825 (15)	5,827 (18)	-2	40,053	31,989

Sumber : IBRD Debtor Reporting System, berdasarkan data yang disediakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dikutip dari *Indonesia, Dimension of Growth*, Laporan Bank Dunia, 7 Mei 1996.

() Pangsa dalam persen

lateral antara Indonesia dan Jepang tersebut di atas dapat dikatakan peranan Jepang dalam perdagangan luar negeri Indonesia juga sangat penting.

SIMPULAN

Penjelasan di atas menunjukkan kenyataan pentingnya peranan Jepang dalam sektor luar negeri Indonesia. Dengan demikian hipotesa terbukti bahwa peranan Jepang adalah *crucial* bagi perekonomian Indonesia. Untuk itu kasus mobnas merupakan kasus yang perlu ditanggapi dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Meskipun Indonesia juga merupakan mitra ekonomi yang sangat penting bagi Jepang, namun demikian penjelasan di atas menunjukkan bahwa "retaliasi Jepang" yang mungkin timbul akibat penanganan kasus mobnas yang kurang bijaksana dapat menimbulkan dampak yang cukup serius pada Indonesia, baik melalui hutang, bantuan pembangunan, maupun perdagangan luar negeri. Oleh sebab itu usul Indonesia dalam agenda acara APEC di Teluk Subic, Filipina tentang liberalisasi otomotif merupakan indikasi kedewasaan Indonesia dalam menangani kemelut kasus mobil nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, (1996) *Indonesia's Monitoring Breakthrough*, Connexion, October-November, Sempati Media.
- Brown, Wilson B., (1979) *The New National Economics*, Addison-Wesley Publishing.
- Djatisasongko Tjahjowijoyo, (1994) *Analisis Dampak Apresiasi Yen terhadap Dollar AS pada Neraca Perdagangan Negara-negara ASEAN dengan Jepang, 1978-1993*, Skripsi S-1, tidak dipublikasikan, FE-UGM, Yogyakarta.
- Hartarto: "Otomotif dan Pertanian Masuk Rencana Aksi, Kompas Sabtu 23 Nov.1996, hal.1.
- Sulaiman, (1996) *Analisis Terhadap Variabel-variabel Permintaan Kendaraan Pribadi (Sedan) di Indonesia Tahun 1973-1994*, Skripsi S-1, tidak dipublikasikan, FE-UGM, Yogyakarta.
- World Bank, (1996) Report no. 15383-IND, *Indonesia, Dimension of Growth*, May 7, 1996.